

STUDI TENTANG PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN DALAM MENANGANAI SAMPAH DI KELURAHAN SAMBUTAN KECAMATAN SAMBUTAN KOTA SAMARINDA

SISKA MONIKA

Abstrak

Berdasarkan Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pengawasan dan Penegakan Hukum Dinas Kebersihan dan Pertamanan Dalam Menangani Sampah di Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda telah berjalan cukup baik. Meskipun ada sebagian kegiatan di lapangan yang berjalan tidak sesuai dengan prosedur yang sudah di tetapkan sehingga hasil yang di dapatkan pun menjadi kurang maksimal. Kemudian, kendala yang dihadapi adalah masih minimnya sarana dan prasarana di kawasan Kelurahan Sambutan seperti kurangnya bak sampah, jauhnya TPA dari pemukiman penduduk, tidak adanya penyapu jalanan, belum dilaksanakannya yustisi sampai di kawasan Kelurahan Sambutan dan faktor yang paling utamanya adalah kurang adanya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.

Kata Kunci : *Pengawasan, Penegakan Hukum, Dinas Kebersihan dan Pertamanan*

Pendahuluan

Dalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan tidak terlepas dari adanya masalah yang perlu mendapatkan perhatian cukup besar, seperti masalah lingkungan hidup, khususnya masalah kebersihan persampahan yang cukup mengganggu.

Masalah yang dihadapi secara garis besar oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda adalah pelayanan dan penanggulangan sampah serta bagaimana upaya menampilkan wajah kota samarinda sesuai dengan mottonya TEPIAN (Teduh, Rapi, Aman, dan Nyaman). Hal ini tentunya mempunyai konsekuensi logis yang harus ditanggung oleh Pemerintah Kota Samarinda. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda sebagai unsur

¹ Mahasiswa Program S1 Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: siskamonika6@gmail.com

pelaksana yang langsung berada dibawah dan bertanggung jawab kepada walikota. Dalam pelaksanaannya memerlukan peran semua pihak yaitu dukungan dari berbagai instansi yang terkait dan juga masyarakat.

Timbunan sampah di Kota Samarinda khususnya kelurahan sambutan berasal dari berbagai sumber kegiatan dan aktivitas masyarakat pada umumnya seiring dengan kemajuan industri pembangunan. Kelurahan sambutan merupakan salah satu kelurahan yang luas di daerah samarinda ini, ada beberapa Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang telah disediakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda di berbagai titik jalan kelurahan sambutan. Dari hasil observasi penulis, masih banyak TPS yang sampahnya berserakan dan berhamburan hingga ke badan jalan sehingga membuat keadaan sekitar berbau tak sedap dan tidak tertata rapi. Hal ini disebabkan karena masyarakat yang kurang sadar akan membuang sampah pada tempatnya dan membuang sampah pada waktu yang telah ditentukan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas maka masalah yang dihadapi dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengawasan dan Penegakan Hukum Dinas Kebersihan dan Pertamanan Dalam Menangani Sampah di Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda ?
2. Apa saja faktor penghambat Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda dalam melaksanakan Pengawasan dan Penegakan Hukum dalam menangani sampah di Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda ?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis pada penelitian ini antara lain yaitu :

1. Untuk mengetahui Pengawasan dan Penegakan Hukum Dinas Kebersihan dan Pertamanan Dalam Menangani Sampah di Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda dalam melaksanakan Pengawasan dan Penegakan Hukum dalam menangani sampah di Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda ?

Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan dapat berguna dan bermanfaat untuk berbagai pihak. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Kegunaan teoritis
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat membandingkan antara teori

yang diperoleh dibangku kuliah dengan kenyataan yang ada dilapangan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan.

2. **Kegunaan Praktis**

Sebagai bahan masukan untuk pertimbangan dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi pemerintah dalam hal ini Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda dalam mempelajari dan memecahkan masalah pengawasan dan penegakan hukum kebersihan sampah di Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda.

Kerangka Dasar Teori

Pengawasan

Pengawasan menurut Soejamto (2004 : 92) adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.

Pengawasan menurut Sukarna (1996 : 113) adalah untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pemecahan agar tidak terulang kembali kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan baru.

Siagian yang dikutip oleh Moekijat (2000 : 57), mengemukakan bahwa pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Kebersihan

Kebersihan berasal dari kata bersih yang artinya bebas dari kotoran tidak tercemar, tidak tercampur dengan unsur (zat lain) serta rapi. Sedangkan pengertian kebersihan adalah (keadaan) bersih, suci, kemurnian dan tidak bernoda (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2007:142).

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 19 Tahun 2002, tentang penertiban sampah dan kebersihan lingkungan pada pasal 1 (i), kebersihan lingkungan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah maupun oleh warga masyarakat untuk membersihkan lingkungan masing-masing atau tempat umum.

Lingkungan

Menurut Otto Soemarwoto, dikutip oleh Daud Silalahi (2001:9) bahwa lingkungan adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi semua kehidupan kita. Lingkungan dapat pula diartikan segala sesuatu yang berada disekitarnya baik berupa benda hidup, benda mati, benda nyata maupun abstrak termasuk manusia lainnya serta suasana yang terbentuk karena terjadinya interaksi diantara elemen-elemen dalam tersebut.

Soewendo Hadiwiyoto(1983:29) lingkungan yang bersih perlu adanya penanganan sampah merupakan perlakuan terhadap sampah untuk memperkecil atau menghilangkan masalah-masalah yang kaitannya dengan lingkungan.

Sampah

Menurut Aprian Rahman (2007) sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Dalam kehidupan manusia, sampah dalam jumlah besar datang dari aktivitas industri yang sering dikenal dengan sebutan limbah.

Herwono (2007) juga mengartikan sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas industri yang sering dikenal dengan sebutan limbah.

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa sampah adalah suatu bahan yang dibuang dari sumber aktivitas manusia yang dapat berupa sayur-mayur, plastik, sisa bahan bangunan, bahan pembungkus, karton, besi, karet, kotoran hewan, limbah

Definisi Konsepsional

Menurut Usman dan Akbar (2003) bahwa konsep dipakai oleh peneliti untuk menggambarkan abstraksi suatu gejala sosial atau gejala alamiah.

Pengawasan dan Penegakan Hukum Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam menangani sampah adalah suatu kegiatan atau serangkaian usaha yang dilakukan untuk mengetahui atau menilai suatu pekerjaan yang dilakukan oleh dinas kebersihan dan pertamanan guna menjamin bahwa semua kegiatan yang sedang berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan agar dapat menciptakan suatu kondisi lingkungan yang bebas dari kotoran, tidak tercemar, dan tertata rapi.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lainnya (Sugiyono 2002:6).

Fokus Penelitian

Fokus penelitian menurut Sugiyono (2007:32) adalah batasan masalah dalam penelitian yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum.

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah :

1. Pengawasan dan penegakan hukum Dinas Kebersihan dalam menangani sampah di kelurahan sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda meliputi :

- a. Pengawasan langsung
 - Inspeksi langsung
 - Observasi di tempat
 - Laporan di tempat
 - b. Pengawasan tidak langsung
 - Laporan tertulis
 - Laporan lisan
 - c. Penegakan hukum (yustisi)
2. Faktor penghambat yang dihadapi Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam menangani sampah di Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda.

Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul penelitian penulis yaitu “Studi Tentang Pengawasan dan Penegakan Hukum Dinas Kebersihan dan Pertamanan Dalam Menangani Sampah dikelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda” maka penulis menetapkan lokasi penelitian di Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda.

Sumber Data

Di dalam penelitian ini yang menjadi subjek pengawasan (pihak yang mengawasi) ialah Dinas Kebersihan dan Pertamanan sedangkan yang menjadi objek pengawasan (pihak yang di awasi) ialah Kelurahan Sambutan.

1. Data Primer, yaitu merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya atau narasumber sebagai informen yang langsung berhubungan dengan fokus penelitian. Berdasarkan fokus penelitian diatas maka yang menjadi informen atau informen kunci (*key informen*) dalam penelitian ini antara lain :

- **Key informen : Kepala Seksi Pengawasan dan Penegakan Hukum Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda**
- **Informen yaitu sebagai berikut :**

Tabel 1
Jumlah Informen

No	Jabatan	Jumlah
1.	Bapak Lurah Kelurahan Sambutan	1 orang
2.	Sekrtaris Lurah Kelurahan Sambutan	1 orang
3.	Ketua LPM Kelurahan Sambutan	1 orang
4.	Sekrtaris LPM Kelurahan Sambutan	1 orang
		4 orang

2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui beberapa sumber informasi antara lain :
 - a. Dokumen

- b. Buku-buku ilmiah

Teknik Pengumpulan Data

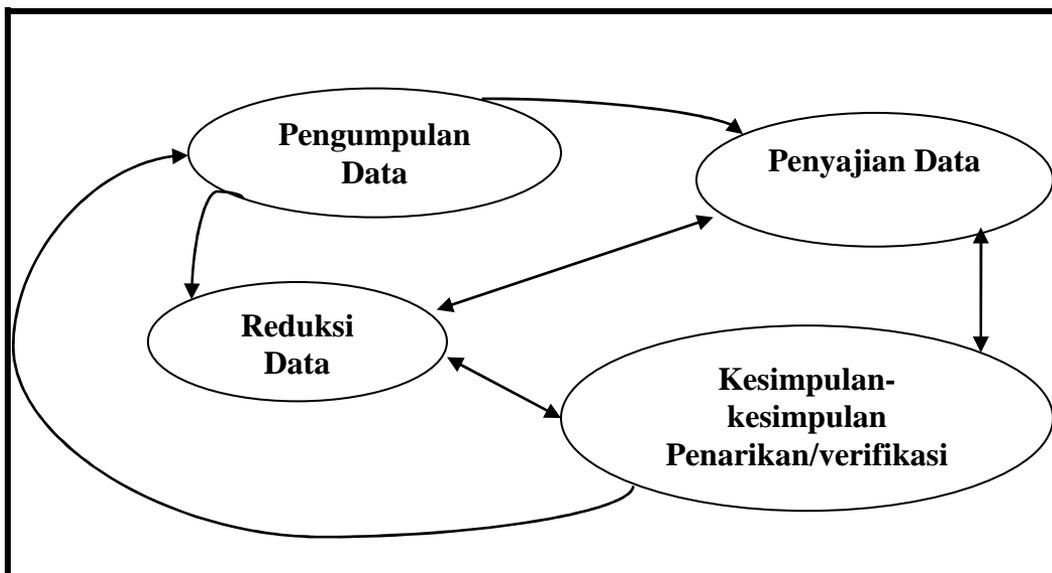
Untuk menghimpun data dilapangan, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research) yaitu mengumpulkan dan mempelajari bahan dari literature yang berhubungan dengan penelitian
2. Penelitian Lapangan (Field Work research) yaitu penelitian langsung ke lokasi yang menjadi objek penelitian sebagai berikut :
 - a. Observasi
 - b. Wawancara
 - c. Dokumentasi

Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data deskriptif kualitatif dari Milles dan Huberman (2007:19) yang meliputi empat komponen terdiri dari pengumpulan data, penyajian data, penyederhanaan data, dan menarik kesimpulan yang dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1
Bagan Analisis Data Model Interaktif



Sumber : Matthew B. Miles and A. Michael Huberman (2007:20)

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pada awalnya Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda sebelum tahun 1978 masih bergabung dengan Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Tingkat II Samarinda sebagai Seksi Kebersihan. Pada tahun 1979 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kotamadya Tingkat II Samarinda dibentuk berdasarkan Perda Nomor 17 Tahun 1979 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kotamadya tingkat II Samarinda.

Selanjutnya Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) menjadi Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) dibentuk berdasarkan Perda Nomor 13 Tahun 1991 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Kotamadya Tingkat II Samarinda.

Perda Nomor 03 Tahun 2001 tanggal 23 februari 2001 tentang Pembentukan Susunan dan Tata Kerja Kantor Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Kota Samarinda merubah Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) menjadi Kantor Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman (KKPP).

Kemudian Perda Nomor 40 Tahun 2004 tanggal 09 Agustus tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda menjadikan status Kantor Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman (KKPP) menjadi Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP), dimana seksi Pemakaman dipindahkan ke Kantor Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda dan sebagaimana tertuang dalam Perda Nomor 11 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Samarinda. Pada Tahun 2009 Urusan Pemakaman bergabung kembali dalam Bidang Pertamanan dan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) pada Seksi Pertamanan pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda hingga saat ini.

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda

a. Tugas Pokok

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda menurut Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Samarinda memiliki Tugas Pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dibidang pekerjaan umum khususnya urusan persampahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dalam merumuskan kebijakan perencanaan operasional program kegiatan pengaturan, pembinaan dan pembangunan serta pengawasan pengembangan prasarana dan sarana, pengelolaan dan bantuan teknik kepada Kecamatan dan Kelurahan dan kelompok masyarakat dalam penanganan persampahan, kebersihan dan pertamanan

sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria kebijakan umum daerah yang mengacu pada kebijakan umum nasional dan propinsi.

b. Fungsi

Fungsi dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda adalah sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis perencanaan program operasional kebersihan dan pertamanan dalam upaya pembinaan, pengembangan, koordinasi, monitoring, evaluasi penyelenggaraan urusan kebersihan sampah, pertamanan, lampu penerangan jalan umum dan pemakaman sesuai norma, standar, dan prosedur yang berlaku dan searah kebijakan umum daerah.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dibidang pekerjaan umum khususnya persampahan dengan melaksanakan pengkoordinasian kebijakan program kedinasan dalam pengaturan penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan prasarana sarana persampahan, lokasi tempat pengolahan sampah terpadu dan atau tempat pemrosesan akhir serta tempat penampungan sementara dengan teknik kebersihan lingkungan angkutan sampah, pengelolaan TPA dan limbah cair sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria kebijakan umum daerah yang mengacu pada kebijakan umum nasional dan propinsi.
3. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja peningkatan kapasitas manajemen dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan prasarana sarana persampahan oleh pihak lain dan pemberian bimbingan teknik kepada Kecamatan, Kelurahan dan kelompok masyarakat serta pelayanan ijin dengan pemberian rekomendasi dan atau advis teknis dan pengelolaan kebersihan, pertamanan, lampu penerangan jalan umum dan pemakaman serta melakukan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat.
4. Penyelenggaraan dan pembiayaan pembangunan prasarana persampahan, penyusunan rencana induk pengembangan prasarana persampahan, kebersihan, pertamanan, lampu penerangan jalan umum dan pemakaman serta melakukan sistem tanggap darurat, pengawasan, pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup serta pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan dan atau diperintahkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan kebijakan umum daerah dan ruang lingkup tupoksi dan tanggung jawab kewenangannya.

Visi dan Misi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda

Visi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda adalah
“Terwujudnya Kota Samarinda yang Asri Tahun 2020”

Misi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan profesionalisme sumber daya aparatur Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda
2. Meningkatkan sarana dan prasarana pengangkutan sampah dan pembersihan jalan
3. Meningkatkan pelayanan kebersihan kota Samarinda
4. Meningkatkan fasilitas taman, penghijauan, penerangan jalan umum dan dekorasi kota
5. Menyediakan tempat pemakaman umum yang tertata rapi
6. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan lingkungan

Hasil Penelitian

a. Pengawasan Langsung

Dari hasil pengamatan penulis pengawasan langsung yang meliputi inspeksi langsung, observasi di tempat dan laporan di tempat yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda di Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan masih kurang baik dan belum berjalan dengan teratur. Di samping pengawasan yang kurang, sarana dan prasarana pendukung seperti Tempat Pembuangan Sampah (TPS) juga masih kurang mencukupi. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara peneliti, juga masih terlihat kurangnya kerjasama dari masyarakat untuk mematuhi segala peraturan tentang pengelolaan sampah sebagaimana yang telah ditentukan.

b. Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan Tidak Langsung yang meliputi laporan tertulis dan laporan lisan pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda berjalan cukup baik dan terkoordinir secara teratur. Karena semua laporan tertulis baik mengenai keuangan, kegiatan yang sedang berlangsung juga hal-hal yg terjadi yang berdampak kepada masyarakat umum, semuanya akan dimasukkan ke dalam laporan tertulis yang nantinya dilaporkan kepada atasan pada agenda rapat rutin. Namun, berdasarkan hasil observasi penulis, masih terdapat beberapa staf bawahan yang tidak sesuai aturan dalam menjalankan tugasnya masing-masing, seperti menunda melaporkan laporan harian kepada atasannya. Laporan tersebut dikerjakan hingga esok hari dan bisa juga sampai dua hari berikutnya.

c. Penegakan Hukum (Yustisi)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti, dapat di simpulkan bahwa penegakan hukum (yustisi) terkait masalah pengawasan mengenai sampah

tidak sampai pada daerah Kelurahan hanya sebatas sampai Kecamatan saja. Hal ini tentu saja akan lebih memungkinkan para masyarakat di daerah kelurahan untuk membuang sampah mereka di sembarang tempat karena tidak ada nya kegiatan operasional yustisi yang langsung ke daerah kelurahan.

d. Faktor Penghambat Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Dalam Menangani Sampah di Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara peneliti, maka dapat diketahui bahwa faktor penghambat yang di hadapi oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan terkait pengawasan dan penegakan hukum mengenai kebersihan lingkungan dari smapah yaitu antara lain masih minimnya sarana dan prasarana di kawasan Kelurahan Sambutan seperti kurangnya bak sampah, jauhnya TPA dari pemukiman penduduk, tidak adanya penyapu jalanan, belum dilaksanakannya yustisi di kawasan Kelurahan Sambutan dan faktor yang paling utamanya adalah kurang adanya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.

Pembahasan

Pada bagian ini peneliti akan mengemukakan tentang pembahasan terhadap data yang telah dikemukakan mengenai fokus penelitian pengawasan dan penegakan hukum Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota samarinda.

1. Pengawasan Langsung

Inspeksi di tempat

Inspeksi Langsung yang dilakukan oleh atasan kepada bawahan terkait pekerjaan dilapangan yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda telah berjalan dengan baik. Hanya saja, tidak adanya penyerahan wewenang sementara untuk menggantikan tugas pegawai dalam mengawasi kegiatan pada saat Kepala Seksi Pengawasan dan Penegakan Hukum tidak berada di tempat. Sedangkan segala bentuk kegiatan di lapangan sangat perlu diawasi guna kelancaraan pekerjaan dan kemaksimalan hasil yang di dapatkan.

Observasi di tempat

Pelaksanaan observasi di tempat masih mengalami beberapa kendala, di antaranya yaitu tidak mengikuti pelaksanaan observasi langsung yang telah dijadwalkan yang dikarenakan kendala cuaca yang tidak mendukung. Hal tersebut menyebabkan adanya ketidaklengkapan atau ketidak-akuratan data yang diambil di lapangan. Dan hal ini dapat menghambat kelengkapan laporan lapangan yang akan di laporkan pada saat rapat rutin dilaksanakan. Jika terjadi kendala seperti ini, maka harus adanya rencana koreksi yang dapat digunakan untuk mengadakan perbaikan guna penyempurnaan data yang lebih akurat.

Laporan di Tempat

Laporan ditempat terkait pengawasan dan penegakan hukum di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda sebenarnya sudah berjalan cukup baik, walaupun ada beberapa kendala yang masih menghambat pelaksanaannya. Segala sesuatu yang terjadi di lapangan akan langsung di laporkan oleh bawahan kepada atasan agar cepat mendapatkan solusi guna penyelesaiannya sehingga tidak mengganggu kegiatan yang sedang berlangsung.

2. Pengawasan Tidak Langsung

Laporan Tertulis

Laporan tertulis pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda berjalan cukup baik dan terkoordinir secara teratur. Karena semua laporan tertulis baik mengenai keuangan, kegiatan yang sedang berlangsung juga hal-hal yg terjadi yang berdampak kepada masyarakat umum, semuanya akan dimasukkan ke dalam laporan tertulis yang nantinya dilaporkan kepada atasan pada agenda rapat rutin. Namun, berdasarkan hasil observasi penulis, masih terdapat beberapa staf bawahan yang tidak sesuai aturan dalam menjalankan tugasnya masing-masing, seperti menunda melaporkan laporan harian kepada atasannya.

Laporan Lisan

Pelaksanaan laporan lisan di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota samarinda tidak berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan atau ditunjukkan karena adanya rasa *sungkan* atau *tidak enak* terhadap sesama pegawai atau staf maupun atasan. Berdasarkan hal tersebut, pelaksanaan laporan lisan yang tidak berjalan dengan baik ini tentunya akan menghambat kelancaran kegiatan kerja pegawai.

3. Penegakan Hukum (Yustisi)

Sampai pada tahun 2013 ini, penegakan hukum (yustisi) terkait masalah pengawasan mengenai sampah belum sampai pada daerah Kelurahan Sambutan hanya sebatas sampai Kecamatan Sambutan saja. Hal ini tentu saja akan lebih memungkinkan para masyarakat di daerah kelurahan untuk membuang sampah mereka di sembarang tempat karena tidak adanya kegiatan operasional yustisi yang langsung ke daerah kelurahan. Sebaiknya penegakan hukum di daerah Kelurahan segera dilaksanakan agar meminimalisir para masyarakat yang suka membuang sampah sembarangan.

4. Faktor Penghambat Yang di Hadapi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Dalam Menangani Sampah di Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda

Faktor penghambat yang di hadapi oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan terkait pengawasan dan penegakan hukum mengenai kebersihan lingkungan dari sampah yaitu antara lain :

1. Tidak semua program kerja yang telah disusun dapat dijalankan dikarenakan terbatasnya anggaran yang diterima dari Pemerintah Daerah.
2. Masih terbatasnya sarana dan prasarana kebersihan seperti armada operasional pengangkutan sampah, bak sampah maupun kontainer sampah.
3. Masih kurang meratanya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan kepada masyarakat khususnya dikawasan Kelurahan Sambutan.
4. Masih kurang disiplinnya masyarakat dalam waktu pembuangan sampah, yaitu pukul 18.00 sore s/d 06.00 pagi, tetapi diluar jam yang telah ditentukan masyarakat pun tetap membuang sampah, akibatnya terkesan tempat pembuangan sampah selalu penuh dan tidak diambil oleh pekerja kebersihan, padahal truk pengambil sampah telah melaluinya pada pagi harinya untuk mengambil sampah yang ada.
5. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya, karena masih ada masyarakat yang membuang sampah disembarang tempat, seperti yang kadang ditemui dipinggir jalan maupun disungai.
6. Sanksi atau hukuman yang diberikan kepada masyarakat yang membuang sampah diluar ketentuan pemerintah kurang memberikan efek jera sehingga masih ditemukan masyarakat yang membuang sampah diluar ketentuan.
7. Adanya pemulung yang mengkorek – korek sampah yang ada ditempat pembuangan sampah (TPS).

Penutup

Pengawasan langsung yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota samarinda yang berupa inspeksi langsung terhadap pekerjaan yang sedang berlangsung telah berjalan cukup baik. Walaupun peneliti masih menemukan beberapa pegawai yang berain-main pada jam kerja dan juga tidak adanya pegawai pegawai yang turun ke lapangan untuk meninjau lokasi kerja pada jadwal yang sudah ditentukan. Observasi di tempat yang belum berjalan dengan baik penunjukkan pegawai yang turun langsung ke lapangan masih sering berganti – ganti yang bisa mengakibatkan ketidakcocokannya data jika tidak ada koordinasi yang baik. Ini akan mengakibatkan hasil pekerjaan menjadi kurang maksimal.

Penanganan sampah yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan sudah terlihat berjalan cukup baik, hanya saja masih kurang

pengawasannya masih kurang maksimal terkait armada pengangkut sampah yang masih kurang dan penyapu jalanan di kawasan Kelurahan Sambutan belum memadai. Pengawasan dan Penegakan Hukum Dinas Kebersihan dan Pertamanan Dalam Menangani Sampah di Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda telah berjalan cukup baik. Meskipun ada sebagian kegiatan di lapangan yang berjalan tidak sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan sehingga hasil yang didapatkan pun menjadi kurang maksimal. Kemudian, kendala yang dihadapi adalah masih minimnya sarana dan prasarana di kawasan Kelurahan Sambutan seperti kurangnya bak sampah, jauhnya TPA dari pemukiman penduduk, tidak adanya penyapu jalanan, belum dilaksanakannya yustisi sampai di kawasan Kelurahan Sambutan dan faktor yang paling utamanya adalah kurang adanya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.

Perlu ditingkatkannya pengawasan baik secara langsung dan tidak langsung untuk memaksimalkan kinerja pegawai dilapangan dan dilakukan secara berkesinambungan sehingga akan meminimalisir kesalahan dan kendala yang ditemukan dilapangan dan berkurangnya kritikan yang masuk ke Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda. Perlu adanya penambahan sarana dan prasarana pendukung kebersihan seperti tempat pembuangan sampah sementara (TPS) serta armada pengangkut sampah dan petugas kebersihan sampah sehingga lebih banyak sampah yang dapat terangkut.

Diberikannya hukuman atau sanksi yang tegas bagi masyarakat yang memebuang sampah sembarangan seperti ikut bekerja membantu petugas sampah dalam melaksanakan proses penanganan sampah selama beberapa kurun waktu tanpa memperoleh upah agar tidak mengulangi perbuatannya. Sebaiknya tim monitoring atau pengawas memiliki kewenangan untuk langsung menindak masyarakat yang diketahui dan tertangkap tangan sedang membuang sampah sembarangan ataupun membuang sampah diluar ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sehingga proses memonitoring kegiatan masyarakat membuang sampah lebih efektif dan efisien.

Daftar Pustaka

- Bohari, 1992. *Pengawasan Keuangan Negara*, Rajawali Press, Jakarta.
- Hasibuan, Malayu S.P.2005. *Manajemen*. Edisi revisi. Jakarta : Bumi Aksara.
- Harahap, Sofyan Syafri, 2004. *Sistem Pengawasan Manajemen*, Pustaka Quantum, Jakarta.

- Sugiyono, M. dan Jusuf Juhir. 1998. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Suharsismi Arikunto. 2002. *Prosedur Penelitian*, cet. XII; Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Uma Sekaran. 2006. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta : Salemba Empat

Dokumen – Dokumen :

- Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 19 Tahun 2002 tentang penertiban Sampah dan Kebersihan Lingkungan pasal 2
- Peraturan Walikota Samarinda Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas, Fungsi, dan Tata kerja Struktur Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda
- Peraturan Daerah (Perda) Kota Samarinda No 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah
- Srtuktur organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008